

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap indeks demokrasi di Indonesia dan Filipina telah mengalami penurunan kualitas demokrasi di kedua negara yang disebabkan oleh kehadiran pemimpin yang bersifat populistis, seperti Presiden Joko Widodo di Indonesia dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina. Kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi di masing-masing negara. Misalnya, kebijakan seperti Undang-Undang ITE di Indonesia dan Undang-Undang Bayanihan di Filipina telah menyebabkan regresi dalam aspek kebebasan berpendapat (Kristal, 2022). Selain itu, kebebasan dan independensi media terus terkikis akibat pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi kebebasan berpendapat di Filipina dan menekankan pentingnya upaya untuk memperkuat dan melindunginya. Selain itu partisipasi politik di Indonesia dan Filipina selama lima tahun terakhir juga telah mengalami perubahan dan variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Pemilihan umum, gerakan sosial, dan keterlibatan masyarakat sipil merupakan aspek penting dari partisipasi politik di kedua negara tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat partisipasi dan aksesibilitas, partisipasi politik ini mencerminkan dinamika demokrasi dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik. Melalui pemilihan umum, gerakan sosial yang aktif, dan peran masyarakat sipil, warga negara berperan dalam membentuk kebijakan, mendorong perubahan sosial, dan memperkuat demokrasi di kedua negara tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan performa partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di Indonesia-Filipina dalam periode 2018-2023 ditengah menguatnya tren populisme. Dengan fokus pada partisipasi politik dan kebebasan berpendapat Pemilihan periode lima tahun terakhir memungkinkan penulis untuk menganalisis tren, perubahan, dan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di kedua negara tersebut ditengah menguatnya populisme. Sebelum memasuki fokus penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan situasi dinamika demokorasi di kedua negara ini.

Sejatinya prinsip utama dalam demokrasi adalah persamaan, partisipasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Persamaan mengacu pada keadilan politik di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan (Irsalina and Atthahara, 2022). Setiap suara dianggap setara dan memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil keputusan. Partisipasi adalah elemen kunci dalam demokrasi. Ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan juga berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas seperti berdiskusi, memberikan pendapat, atau mengorganisir kelompok kepentingan. Partisipasi yang aktif dan beragam adalah inti dari demokrasi yang sehat, karena melibatkan seluruh spektrum masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak ini mencakup kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan hak-hak lainnya yang memastikan martabat dan kebebasan individu dalam masyarakat (Zulfadli and Taufani, 2022). Selain prinsip-prinsip dasar ini, demokrasi juga ditopang oleh seperangkat institusi dan mekanisme yang mengatur sistem politik. Beberapa institusi yang umum dalam demokrasi termasuk parlemen atau kongres, partai politik, pemilihan umum, lembaga yudikatif yang independen, dan kebebasan pers. Institusi-institusi ini berfungsi untuk mewakili kepentingan rakyat, menjalankan pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu.

Secara historis Indonesia, mengalami transisi yang signifikan menuju demokrasi sejak era Reformasi pada tahun 1998 (Widiyanta, Djumawan and Hartono, 2016). Performa demokrasi di Indonesia selama lima tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam periode tersebut, fokus utama adalah partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Dalam konteks partisipasi politik, dimana terdapat data yang menjelaskan terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan umum yang telah meningkat dengan tingkat partisipasi mencapai 75,11% pada Pemilu 2014 dan meningkat menjadi 80,50% pada Pemilu 2019 (Kusnandar, 2022). Tahun-tahun tersebut merupakan periode dimana partisipasi politik mengalami kenaikan secara signifikan dan akan diperkirakan mengalami peningkatan namun terdapat tren populisme yang mengancam partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Sehingga semakin banyak kelompok masyarakat yang terorganisir dan aktif baik dalam mengawasi pemerintahan, seperti gerakan anti-korupsi yang memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal partisipasi politik di Indonesia selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Jokowi telah mengalami perubahan yang mencakup pemilihan umum, gerakan sosial, dan keterlibatan masyarakat sipil. Pemilihan umum mencerminkan tingkat antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam mengekspresikan pilihannya, sedangkan gerakan sosial seperti gerakan mahasiswa telah mendorong isu-isu sosial dan politik melalui demonstrasi dan diskusi publik. Disisi lain juga tren populisme di Indonesia meningkat dengan adanya pembubaran FPI dan HTI, yang memicu debat dan polarisasi kelompok atau politik identitas. Pembubaran FPI pada tahun 2020 sebagai respons terhadap ketegangan sosial. FPI memiliki pengaruh signifikan, tetapi kontroversial karena pelanggaran hukum dan penyalahgunaan hak asasi manusia. Begitu pula, pembubaran HTI pada tahun 2017 menarik perhatian karena tujuannya yang mengancam kesatuan nasional (Aswar, 2022). Pembubaran ini menciptakan dinamika kompleks, dengan dukungan dan kontroversi terkait kebebasan berpendapat dan beragama. Retorika populis terlihat dari pihak yang mendukung atau menentang pembubaran, dengan fokus pada isu keagamaan dan identitas. Situasi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan partisipasi konstruktif dari berbagai kelompok dalam merumuskan kebijakan yang mempromosikan harmoni, keadilan, dan demokrasi di Indonesia.

Di periode tersebut keterlibatan masyarakat sipil melalui organisasi non-pemerintah dan lembaga advokasi juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui advokasi dan pengawasan. Meskipun demikian, partisipasi politik tidak merata di seluruh masyarakat Indonesia, dengan beberapa kelompok menghadapi hambatan dalam berpartisipasi (Zulkarnaen *et al.*, 2020). Melihat keseluruhannya bahwa partisipasi politik di Indonesia mencerminkan dinamika demokrasi dan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Kebebasan berpendapat di Indonesia telah berkembang dengan adanya beragam media, termasuk media daring yang memberikan ruang bagi perdebatan dan ekspresi pendapat. Namun, masih terdapat tantangan seperti adanya kasus pembatasan kebebasan berpendapat melalui UU ITE dan intimidasi terhadap jurnalis (Marwandianto and Nasution, 2020). Adapun partisipasi yang masih rendah dari kalangan masyarakat kurang terdidik dan kurang mampu secara ekonomi juga menjadi permasalahan. Dalam hal praktik politik yang juga merusak integritas pemilihan umum dan partisipasi politik yang sehat (Jamaluddin, 2021).



Konteks kebebasan berpendapat, terjadi perkembangan yang positif di Indonesia selama periode lima tahun terakhir. Masyarakat memiliki akses yang semakin luas terhadap media massa dan platform digital yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat dan informasi secara bebas. Lebih banyak kelompok masyarakat juga terlibat dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Meskipun demikian, Indonesia dapat dikategorikan sebagai demokrasi substansial yang mengalami perkembangan positif dalam aspek kebebasan berpendapat. Jika mengacu pada penelitian yang diterbitkan freedomhouse pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 59 dari 100 dalam hal kebebasan politik dan hak sipil (Freedom House, 2022a) dimana nilai tersebut dapat terbilang cukup rendah pada target demokrasi yang baik.

Namun, masih ada kendala dalam kebebasan berpendapat di Indonesia. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat masih terjadi oleh pihak berwenang, seperti penangkapan aktivis dan jurnalis yang dianggap mengkritik pemerintah (Marwandianto and Nasution, 2020). Selain itu, masih ada praktik intoleransi dan kekerasan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dianggap berbeda pendapat. Melihat performa demokrasi Indonesia dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam partisipasi politik dan kebebasan berpendapat. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dari seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat kebebasan berpendapat serta hak asasi manusia secara umum.

Sedangkan Filipina, juga merupakan negara demokrasi tertua di Asia Tenggara. Perjalanan Filipina menuju demokrasi dimulai setelah jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1986 yang dipimpin Ferdinand Marcos yang menggunakan hukum darurat militer sebagai alat untuk menekan oposisi (Crowther, 1986). Terlihat bagaimana kediktatoran pemerintahan Filipina pada masa tersebut dengan menggunakan kekuatan militer untuk merepresif rakyat sehingga tidak adanya kebebasan dari rakyat. Namun pemerintahan tersebut berhasil digulingkan menuju kearah Demokrasi yang dianggap sebagai simbol kebebasan dan hak di seluruh dunia, dan menjanjikan untuk menanamkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan (Huntington, 1995). Sebagai negara demokratis di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan bagi negara, Demokrasi di negara ini telah tangguh dan dinamis, tetapi beberapa pengamat mencatat penurunan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Dimana adanya penurunan terutama terkait dengan hak-hak fundamental, pengawasan pemerintah, administrasi yang netral, dan partisipasi masyarakat

sipil. Pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan tantangan bagi lembaga-lembaga dan proses-proses demokratis (Jacinto, 2021).

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat dan ide-idenya tanpa rasa takut akan sensor. Kebebasan berpendapat merupakan dasar demokrasi yang memungkinkan berbagi pandangan dan opini masyarakat. Hak kebebasan berekspresi sangat penting dalam demokrasi. Informasi dan ide-ide membantu memperkaya debat politik dan menjadi hal penting dalam akuntabilitas publik (Apsari and Sudibya, 2021). Di Filipina, kebebasan berpendapat dilindungi oleh Konstitusi. Namun, ada beberapa kejadian di mana pemerintah berusaha menekan kebebasan berpendapat, terutama dalam media (Viryawan, Maritza and Setyaningrum, 2022). Sedangkan partisipasi Filipina, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Mereka dapat memberikan suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan partai politik, dan berpartisipasi dalam protes damai. Namun, ada beberapa kejadian di mana pemerintah berusaha menekan partisipasi, terutama dalam media. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat di Filipina yang mengalami kemunduran performa demokrasi dengan terjadinya beberapa isu yang menjadi perhatian adalah penindasan terhadap media independen, serangan terhadap jurnalis, serta upaya pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers (Kristal, 2022). Populisme juga meningkat di Filipina dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Rodrigo Duterte, yang terpilih pada tahun 2016, dikenal dengan pendekatan populisnya. Ia menggunakan bahasa kasar dan retorika kontroversial untuk menarik perhatian publik, terutama dalam kampanye melawan narkoba. Populisme Duterte mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang korup dan kegagalan pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. Namun, pendekatan populis Duterte juga mendapatkan kritik karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan kekerasan secara berlebihan (Viryawan, Maritza and Setyaningrum, 2022).

Demikian pula, partisipasi politik di Filipina selama lima tahun terakhir juga mengalami perubahan dan variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, tetap menjadi mekanisme penting bagi warga Filipina untuk mengekspresikan pilihan politik mereka (Irsalina and Atthahara, 2022). Selama periode ini, gerakan sosial seperti gerakan hak asasi manusia, perempuan, lingkungan, dan anti-korupsi telah aktif dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan politik melalui unjuk rasa, kampanye publik, dan advokasi. Di samping itu,



masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan lembaga pemantau juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik, memperjuangkan hak-hak warga negara, dan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Namun, penting untuk diakui bahwa partisipasi politik tidak merata di seluruh masyarakat Filipina, dengan beberapa kelompok memiliki akses yang lebih besar dan lebih aktif terlibat dalam proses politik daripada yang lain (Syifa, Aini and Nathania, 2022). Secara keseluruhan, partisipasi politik di Filipina mencerminkan keragaman dan dinamika demokrasi, di mana pemilihan umum, gerakan sosial, dan keterlibatan masyarakat sipil berperan penting dalam membentuk kebijakan publik, mendorong perubahan sosial, dan memperkuat demokrasi di negara ini.

Dalam penelitian yang dilakukan *freedomhouse* tahun 2022 negara Filipina menempati posisi ke 55 dari 100 (Freedom House, 2022b) Angka ini tidak terpaud jauh dengan kondisi Indonesia dalam hal indikator negara demokrasi yang masih tergolong jauh terkait kebebasan politik dan hak sipil. Perkembangan ini mencerminkan adanya penurunan dalam pluralisme politik dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di Filipina. Situasi ini mengkhawatirkan karena demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik membutuhkan kebebasan sipil yang kuat, hak politik yang dihormati, dan keterlibatan yang inklusif dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ini harus diatasi melalui upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, memastikan perlindungan hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan mengembangkan ruang politik yang inklusif bagi semua warga Filipina.

Kebijakan-kebijakan pada masa tersebut juga telah menyebabkan munculnya aksi *Vigilante*, yaitu tindakan penangkapan dan penembakan langsung terhadap individu yang terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kelompok ini dilakukan tanpa melalui proses hukum yang adil, sehingga menimbulkan keprihatinan serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan individu (Kine, 2017). Selain itu, Filipina juga menghadapi peningkatan kekerasan terhadap pihak oposisi dalam ranah politik. Kekerasan ini meliputi tindakan kriminal dan penuntutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak oposisi. Tindakan tersebut bertujuan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mempersempit ruang demokrasi yang ada.

Selama lima tahun terakhir, Filipina telah menghadapi tantangan utama dalam hal kebebasan sipil dan hak politik dalam konteks demokrasi. Di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte, indeks demokrasi di negara tersebut mengalami beberapa penurunan. Adapun penurunan ini terutama disebabkan oleh penerapan kebijakan yang diperkenalkan oleh Presiden Duterte dalam upayanya untuk memberantas peredaran narkoba. Selain itu, undang-undang baru seperti *Anti-Terrorism Act 2020* juga telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat (McCarthy, 2020).

Sebagai penutup latar belakang skripsi, permasalahan demokrasi di Indonesia dan Filipina menjadi fokus yang kompleks dan penting untuk dipahami. Penurunan kualitas demokrasi yang dihubungkan dengan kehadiran pemimpin populis serta kebijakan yang mengancam kebebasan sipil menjadi isu sentral. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang meliputi penguatan lembaga-lembaga demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, promosi keadilan, dan dukungan terhadap kebebasan berpendapat serta kebebasan media. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, memperkuat prinsip-prinsip pluralisme, serta membangun dialog yang inklusif dan konstruktif juga merupakan upaya penting dalam memperbaiki situasi demokrasi di kedua negara. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik di Indonesia dan Filipina.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka memunculkan pertanyaan yang menjadi focus dalam penelitian ini yakni:

- Bagaimana performa perkembangan partisipasi politik dan kebebasan berpendapat ditengah menguatnya tren populisme Indonesia dan Filipina tahun 2018-2023 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Performa Partisipasi Politik dan Kebebasan Berpendapat Indonesia-Filipina 2018-2023 di Tengah Menguatnya Populisme” tujuan penelitian yang hendak disampaikan penulis yakni:

1. Menganalisis perbandingan performa demokrasi di Indonesia dan Filipina dalam focus partisipasi politik dan kebebasan berpendapat pada tahun 2018-2023 di tengah menguatnya tren populisme.
2. Menganalisis sejauh apa populisme mempengaruhi performa partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di kedua negara.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun memasuki pada manfaat penelitian, penulis akan menjabarkan secara Teoritis dan Praktis dengan menguraikan manfaat apa yang akan didapatkan melalui penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan Hubungan Internasional terutama dalam memahami dan melihat perbandingan performa demokrasi di Indonesia dan Filipina dalam fokus partisipasi politik dan kebebasan berpendapat pada tahun 2018-2023 di tengah menguatnya tren populisme.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis akan kembali diuraikan penulis diantaranya

- 1) Manfaat bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan lebih dalam terkait isu yang relevan, adapun ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam program studi hubungan internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta.
- 2) Manfaat bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah ilmu dalam kajian literatur Hubungan Internasional dan menjadi rujukan mengenai performa demokrasi Indonesia-Filipina dalam kebebasan berpendapat dan partisipasi politik dalam tahun 2018-2023 terakhir. Adapun harapannya bagi akademisi selanjutnya dapat mengembangkan topik yang diajukan dalam skripsi ini yang mungkin tidak secara terperinci dijelaskan lebih dalam.
- 3) Manfaat bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini harapannya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum yang



ingin mengetahui dan mendalami terkait pengetahuan dalam keilmuan Hubungan Internasional terutama dalam hal pengaruh pengaruh populisme terhadap partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di Indonesia dan Filipina.

### **1.5. Sistematika Bab**

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika kepenulisan dalam 5 Bab sesuai dengan ketewntuan yang telah ditetapkan yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan latar belakang permasalahan terkait topik yang menjadi fokus penulisan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan bagaimana kedua negara ini memiliki ciri-ciri demokrasi serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses dinamikanya. Selain itu, penulis juga menyajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, dan menguraikan struktur penulisan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Skripsi dengan topik yang dibahas. Seluruh informasi tersebut tercakup dalam konteks tersebut.:

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Sistematika Bab

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan secara rinci teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Penulis juga akan melakukan tinjauan ulang terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengangkat topik yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis akan menyajikan kerangka pemikiran yang akan digunakan dan merumuskan kesimpulan sementara atau hipotesis terkait dengan penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Peneliti akan menjelaskan kategori penelitian dan strategi yang diterapkan dalam penelitian untuk menghimpun informasi dan teknik evaluasi data yang digunakan, beserta variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam studi tersebut.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan temuan dan bukti-bukti yang dihasilkan dari analisis terhadap masalah penelitian yang terkait dengan teori, konsep, hipotesis, dan metode yang digunakan.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Ini akan mencakup kesimpulan dan rangkuman mengenai argumen yang telah diajukan, saran yang telah diberikan, serta agenda penelitian lanjutan yang dianggap penting untuk dijalankan atau dikembangkan.



